

PERAN SEKRETARIAT DEWAN DALAM MEMBANTU PELAKSANAAN ADMINISTRASI FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR.

ABSTRAK

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Kepala Daerah memiliki kedudukan yang setara dan bersifat kemitraan. Dalam kedudukan kerja yang setara tersebut tidak hanya terkandung makna kesetaraan dalam hal otoritas tetapi semestinya juga setara dalam hal tanggung jawab dan kapasitas dalam memastikan proses pemerintahan dan pembangunan berjalan dengan baik. Posisi DPRD dalam pemerintahan daerah memegang tiga peranan penting yakni, legislasi, anggaran dan pengawasan. Dalam hal ini, berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari sekretariat DPRD dituntut untuk memberikan pelayanan yang profesional dan berkualitas untuk mendukung fungsi DPRD sebagai wakil rakyat yang menyerap aspirasi rakyat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, mengetahui tentang peran Sekretariat Dewan dan faktor apa yang menjadi kendala dalam membantu pelaksanaan administrasi fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan pada kantor Sekretariat Dewan Kabupaten Barito Timur dengan informan 10 (sepuluh) orang Pejabat/ Staf di lingkungan Sekretariat Dewan Kabupaten Barito Timur yang terdiri dari informan kunci yaitu Sekretaris Dewan, Kepala Bagian Umum, dan Kepala Bagian Persidangan dan Produk Hukum yang keseluruhannya berjumlah 3 (tiga) orang, sedangkan informan utama yaitu Staf di Lingkungan Sekretariat Dewan Kabupaten Barito Timur sebanyak 7 (tujuh) orang.

Dari hasil penelitian ini dapat diperoleh bahwa dalam pelaksanaan fungsi perwakilan DPRD Kabupaten Barito Timur, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur ternyata sudah cukup baik yang berkaitan dengan pertanggungjawaban kinerja staf terhadap rencana kerja, kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur penerapan, dengan program yang memberikan hasil yang optimal dan kewajiban dari institusi atau aparat yang bekerja di dalamnya untuk membuat kebijakan atau melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai yang berlaku maupun kebutuhan masyarakat. Adapun faktor yang menjadi kendala Sekretariat Dewan Kabupaten Barito Timur dalam membantu fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur adalah dilihat dari Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Timur seperti dari segi pembagian kerja atau spesialisasi dan koordinasi yang harus ditingkatkan lagi.

Kata Kunci: Sekretariat Dewan, Pelaksanaan Administrasi.

ABSTRACT

As stipulated in Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, that the Regional People's Representative Council (DPRD) and the Regional Head have equal positions and are partnerships in nature. In this equal working position, it does not only contain the meaning of equality in terms of authority but should also be equal in terms of responsibility and capacity in ensuring that governance and development processes run well. The position of DPRD in local government holds three important roles namely, legislation, budget and supervision. In this case, based on the main tasks and functions of the DPRD secretariat, it is required to provide professional and quality services to support the DPRD's function as people's representative who absorbs people's aspirations.

This study aims to analyze, find out about the role of the Council Secretariat and what factors are the obstacles in assisting the implementation of the administrative functions of the Regional People's Representative Council of East Barito Regency.

The research method used in this research is descriptive qualitative. This research was conducted at the East Barito Regency Council Secretariat office with informants 10 (ten) Officers/Staff within the East Barito Regency Council Secretariat consisting of key informants namely the Council Secretary, Head of the General Section, and Head of the Trial Section and Legal Products, the total of which is 3 (three) people, while the main informants, namely Staff in the Secretariat of the East Barito Regency Council, were 7 (seven) people.

From the results of this study it can be obtained that in the implementation of the representative functions of the DPRD of East Barito Regency, the Secretariat of the Regional People's Representative Council of East Barito Regency has turned out to be quite good with regard to staff performance accountability for work plans, conformity between implementation and standard implementation procedures, with programs that provide optimal results and the obligations of institutions or officials working within them to make policies or take actions that are in accordance with prevailing values and the needs of society. The factors that become obstacles to the East Barito Regency Council Secretariat in assisting the functions of the East Barito Regency Regional People's Legislative Council are seen from the East Barito Regency DPRD Secretariat such as in terms of division of labor or specialization and coordination which must be improved again.

Keywords: *Council Secretariat, Administrative Implementation.*

DAFTAR PUSTAKA

- Andi, Nurdin Usman, 2004, Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan, Bandung.
- Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut Asas Desentralisasi Berdasarkan UUD 1945, Disertasi, 1990, UNPAD, Bandung.
- Bungin, Burhan, 2007, Penelitian Kualitatif, Jakarta : Kencana.
- Bungin, Burhan. 2009. Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: Raja Grafindo Persada
Cangara, Hafied. 2013. Pengantar Ilmu Komunikasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dharma Setyawan Salam, 2002, Manajemen pemerintahan Indonesia, Jakarta: Djambatan.
- Hasibuan S.P Malayu, 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasibuan S.P Malayu, 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi Revisi I), Jakarta: Bumi Aksara.
- Henry Simamora, 2006, Manajemen Sumber Daya Manusia, Yogyakarta: STIE YKPN Yogyakarta.
- Irawan Soejito, Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Bina Aksara, Jakarta, 1981.
- Keban, Yeremis T, Enam Dimensi Stategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu, Gava Media, Yogyakarta, 2004.
- Keban, Yeremias T. 2007. Pembangunan Birokrasi di Indonesia: agenda kenegaraan yang terabaikan, Pidato Guru Besar Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Mangkunegara, Anwar Prabu, 2003, Perencanaan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Jakarta: Refika Aditama.
- Nasucha, Chaizi, 2004, Reformasi Administrasi Public: Teori Dan Praktek, Jakarta: Grasindo
- Ndraha, Taliziduhu, 1989, Konsep Administrasi Dan Administrasi Di Indonesia, Jakarta: Bina Aksara
- Inu Kencana Syafiie, 1999, Ilmu Administrasi Publik, Jakarta: Rineka Cipta.
- Kartono Kartini, 2002. Pemimpin dan Kepemimpinan (Apakah Pemimpin Abnormal Itu?). Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Kansil.2003, Sistem Pemerintahan Indonesia. Jakarta, Bumi Aksara.
- L.P. Sinambela, Ilmu dan Budaya, 1992. Perkembangan Ilmu Administrasi Negara,

Edisi Desember.

Moleong J. Lexy. 2005. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mustopadidjaja AR. 2003. SANKRI Buku I prinsip-prinsip penyelenggaraan Negara, Jakarta, Gunung Agung.

Ndraha Taliziduhu, 2003. Budaya Organisasi, Edii II. Jakarta, penerbit Rineka Cipta.

Pandji Santosa, 2008. Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance, Bandung: PT. Reflika Aditama.

Sedarmayanti, 2001, Dasar-Dasar Pengetahuan tentang Manajemen Perkantoran, Bandung, Mandar maju.

Simamora, Henry. 2004, Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi 3. Cetakan Pertama. STIE YKPN, Yogyakarta

Sufian Hamin. 2005. Administrasi, Organisasi, dan Manajemen, Pekanbaru, UIR Press.

S. Mutiara, Panggabean. 2004. Manajemen Sumber Daya Manusia. Ghalia Indonesia. Bogor.

Sagala, Syaiful, 2007. Manajemen Strategik dalam meningkatkan mutu pendidikan. Alfabeta. Bandung.

Syafii Inu Kencana. 2003. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANKRI). Jakarta, Bumi Aksara.

Sufian. 2005, Organisasi dan Manajemen. Perpustakaan Nasional. Katalog dalam terbitan KDT.

Sugiono, 2011, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung, Alfabeta.

Singarimbun, 1987, Metode Penelitian Survey, Jakarta, Penerbit, LP3ES.

Soeprihanto, John. 1996. Penelitian dan Pengembangan Karyawan. Edisi Pertama. Cetakan Kedua. Yogyakarta.

Sondang P. Siagian, 2007, Organisasi, Kepemimpinan dan Prilaku Administrasi. CV. Haji Masagung, Jakarta

Zulkifli. 2005. Pengantar Studi Ilmum administrasi dan manajemen, Pekanbaru, Uir Press.

B. PERATURAN

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur.

Peraturan Bupati Riau Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 30 Tahun 2014 Tentang tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur.

C. LAINNYA

Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Timur. 2012, Kumpulan Gagasan dan Pemikiran DPRD Kabupaten Barito Timur.

Profil DPRD Kabupaten Barito Timur Periode 2019-2024